BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun pengertian standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang dikutip oleh Indra Bastian (2010:138) adalah sebagai berikut:

> "Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah".

Menurut Abdul Halim (2010:89) pengertian standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

> "SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan leporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.1.1.2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun tujuan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Nurlan Darise (2008:39) mengemukakan bahwa tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah:

> "Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan".

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010:138) tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah:

> "Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah".

Berdasarkan tujuan yang dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Deddi Nordiawan (2007:123) mengemukakan bahwa ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerpan standar akuntansi pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah".

Sementara ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Abdul Halim (2010:91), sebagai berikut:

> "SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undang satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan".

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

2.1.1.4 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Indra Bastian mengemukakan muatan isi masing-masing SAP (2010:140) yaitu sebagai berikut:

1) SAP No 01 – Penyajian Laporan Keuangan
2) SAP No 02 – Laporan Realisasi Anggaran
3) SAP No 03 – Laporan Arus Kas
4) SAP No 04 – Laporan Catatan atas Laporan Keuangan
5) SAP No 05 – Akuntansi Persediaan
6) SAP No 06 – Akuntansi Investasi
7) SAP No 07 – Akuntansi Aset Tetap
8) SAP No 08 – Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan
9) SAP No 09 – Akuntansi Kewajiban
10) SAP No 10 – Akuntansi untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
11) SAP No 11 – Akuntansi Khusus untuk Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

Adapun penjelasan dari muatan isi masing-masing SAP adalah sebagai berikut:

1) SAP No 01 – Penyajian Laporan Keuangan

Mencakup basis akuntansi laporan keuangan. Basis akuntansi adalah prinsip penentuan kepan suatu transaksi diakui. Basis akuntansi berkaitan dengan waktu pengakuan transaksi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan yaitu basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperlihatkan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Unit pemerintah menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual dan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang diatur dalam undang – undang. Pada dasarnya semua laporan keuangan tujuan umum disusun dengan menggunakan basis akrual. Namun karena anggaran negara/daerah masih disusun berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

2) SAP No 02 – Laporan Realisasi Anggaran

Mencakup pengertian laporan realisasi anggaran dan tujuan realisasi anggaran. Pengertian laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menunjukan ketaatan pemerintah terhadap APBN/APBD. Tujuan standar realisasi

anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran menyediakan unsur-unsur : Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit LRA, Pembiayaan, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

3) SAP No 03 – Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa depan, serta berguna untuk menilai kecermatan taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran seama satu periode akuntansi. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang setiap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas transitoris merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan entitas yang bersangkutan.

4) SAP No 04 – Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya terbatas untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan harus meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, (b) Informasi tentang

kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, (d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atau transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, (e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan, (f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan , dan (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5) SAP No 05 – Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada saat akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventasirasi fisik. Persediaan

disajikan sebesar (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, (b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengen memproduksi sendiri, (c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan (a) metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang, (b) harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventasirasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

6) SAP No 06 – Akuntansi Investasi

Hakikat investasi dapat berupa pembelian surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, royalti, atau manfaat sosial, sehinggal dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi meliputi: (a) investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama satu tahun atau kurang, (b) investasi jangka panjang,

yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari setahun. Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut serta nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pada dasarnya investasi dicatat sebagai biaya perolehan, apabila biaya perolehan tidak ada, maka investasi nilai sebesar nilai wajar. Ada tiga metode penilaian investasi pemerintah, yaitu: (a) metode biaya, dengan metode ini investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan hasil investasi tidak mempengaruhi besarnya investasi, (b) metode ekuitas, dengan metode ini investasi awalnya dicatat berdasarkan harga perolehan. Bagian laba atau rugi akan menambah atau mengurangi investasi, (c) metode nilai bersih yang dapat direalisasi, dengan metode ini investasi dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Penggunaan ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut: metode biaya digunakan apabila kepimilikan pemerintah kurang dari 20%, metode ekuitas digunakan apabilan kepemilikan pemerintah antara 20% sampai 50% dan kepemilikan di atas 50%, metode nilai bersih yang dapat direalisasi digunakan untuk investasi jangka panjang non-permanen.

7) SAP No 07 – Akuntansi Aset Tetap

Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap harus diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun untuk

digunakan atau dimaksudkan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dalam pemerintahan diklasifikasi ke dalam berbagai kelompok, yaitu: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria agar aset tetap dapat diakui adalah: berwujud, memiliki maa manfaat lebih dari setahun, harga perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib di bayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

8) SAP No 08 – Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan

Pernyataan Standar ini memberikan pedoman untuk (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Kontruksi dalam Pengerjaan; (b) penetapan biaya yang dikapitalisasi dan disajikan pada neraca; dan (c) penetapan dasar pengakuan dan pengungkapan biaya kontruksi. Salah satu jenis aset tetap adalah kontruksi dalam pengerjaan. Kontruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap

lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Kontrak kontrusi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk kontruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau pengunaan utama.

9) SAP No 09 – Akuntansi Kewajiban

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pada saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan ke kewajiban tersebut. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pada dasarnya kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal kewajiban merupakan nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

10) SAP No 10 – Akuntansi untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

Tujuan Penyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubuahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas, dan tidak diharapkan terjadi karena berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas, koreksi yang berpengaruh meterial pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi hanya dimungkinkan apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

11) SAP No 11 – Akuntansi Khusus untuk Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan dari semua laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai suatu entitas tunggal. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasioanal, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Lpaoran Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Entitas akuntansi unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator untuk standar akuntansi pemerintahan adalah muatan isi masing-masing SAP.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

2.1.2.1.1 Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2013:22) adalah sebagai berikut:

> "Sistem adalah kumpulan/grup/ dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu".

Menurut Sutarman (2009:5) pengertian sistem adalah sebagai berikut:

> "Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama".

Dari dua pengertian sistem yang dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencaai satu tujuan.

2.1.2.1.2 Pengertian Pengendalian Intern

Pengertian sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2008:163), adalah sebagai berikut:

> "Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen".

Adapun pengertian pengendalian intern menurut Sukrisno Agoes (2014:100), sebagai berikut:

> "Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

Sementara menurut Mardi (2014:59), pengertian pengandalian intern adalah sebagai berikut:

> "Pengendalian internal adalah suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas untuk menjaga seluruh kekayaan organisasi dan memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian sistem dan pengendalian intern diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi dalam suatu entitas untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan organisasi.

2.1.2.2 Komponen Pengendalian Intern

Menurut Abdul Halim (2015:214), pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan sebagai berikut:

1) Lingkungan pengendalian
2) Penaksiran risiko
3) Aktivitas pengendalian
4) Informasi dan komunikasi
5) Pemantauan

Adapun penjelasan dari lima komponen pengendalian yaitu sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

   Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2) Penaksiran Risiko

   Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bilamana risiko harus dikelola.

3) Aktivitas Pengendalian

   Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

4) Informasi dan Komunikasi

   Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

5) Pemantauan/Monitoring

   Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Menurut Abdul Halim (2015:214), komponen pengendalian intern tersebut berlaku dalam audit setiap entitas. Komponen tersebut harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan:

1) Ukuran entitas
2) Karakteristik kepemilikan dan organisasi entitas
3) Sifat bisnis entitas
4) Keberagaman dan kompleksitas operasi entitas
5) Metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengolah, memelihara, dan mengakses informasi
6) Penerapan persyaratan hukum dan peraturan

2.1.2.3 Indikator Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2008:172) alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

> "Untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapain tujuan dengan efisien. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi".

Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2008:163) adalah sebagai berikut:

1. Keandalan informasi keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Adapun penjelasan dari tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Keandalan informasi keuangan

   Pengendalian intern ini membuat manajemen bertanggungjawab menyiapkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak intern dan ekstern perusahaan. Laporan yang disajikan harus dapat diandalkan.

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

   Pengendalian intern ini dimaksudkan agar organisasi melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

3. Efektivitas dan efisiensi operasi

   Pengendalian intern dalam perusahaan merupakan alat untuk mengurangi kegiatan pemborosan dan mengurangi pengunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien dalam operasi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator untuk sistem pengendalian intern adalah tujuan umum sistem pengendalian intern.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Indra Bastian (2010:9), sebagai berikut:

> "Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan".

Sementara menurut Irham Fahmi (2014:2) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

> "Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut".

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut S. Munawir (2010:2), mengemukakan bahwa:

> "Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tata atau aktivitas perusahaan tersebut".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi dan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2010:297) sebagai berikut:

> "Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan infomasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide eange users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan".

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara umum yang dikemukakan Erlina Rasdianto (2013:21) dan Peraturan Pmerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

> "Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya".

Adapun tujuan laporan keuangan secara khusus menurut Indra Bastian (2010:297) sebagai berikut

> “Secara spesifik, tujuan khusus laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukan akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercayakan”.

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara khusus menurut sebagai Erlina Rasdianto (2013:21) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahanberikut:

> “Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.3.3 Indikator Laporan Keuangan

Menurut Indra Batian (2010:110) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Adapun penjelasan dari keempat karakteristik kualitatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan

   Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya memiliki umpan balik (*feedback value*) yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu dan memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa lalu.

2. Andal

   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan, dapat diverifikasi atau dengan kata lain informasi dalam laporan keuangan dapat diuji.

3. Dapat dibandingkan

   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator untuk kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi (Abdul Halim, dkk. 2010:32). SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah (Abdul Halim, dkk. 2010:32). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Abdul Halim, dkk. 2010:47). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Abdul Halim, dkk. 2010:47).

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas (Manuppan Bangun Tua, 2015). Tujuan tersebut menjamin kepatuhan hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah (Manuppan Bangun Tua, 2015). Untuk meyakinkan *stakeholders* maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal (Arina Roshanti, Edy Sujana, Kadek Sinarwati, 2014).

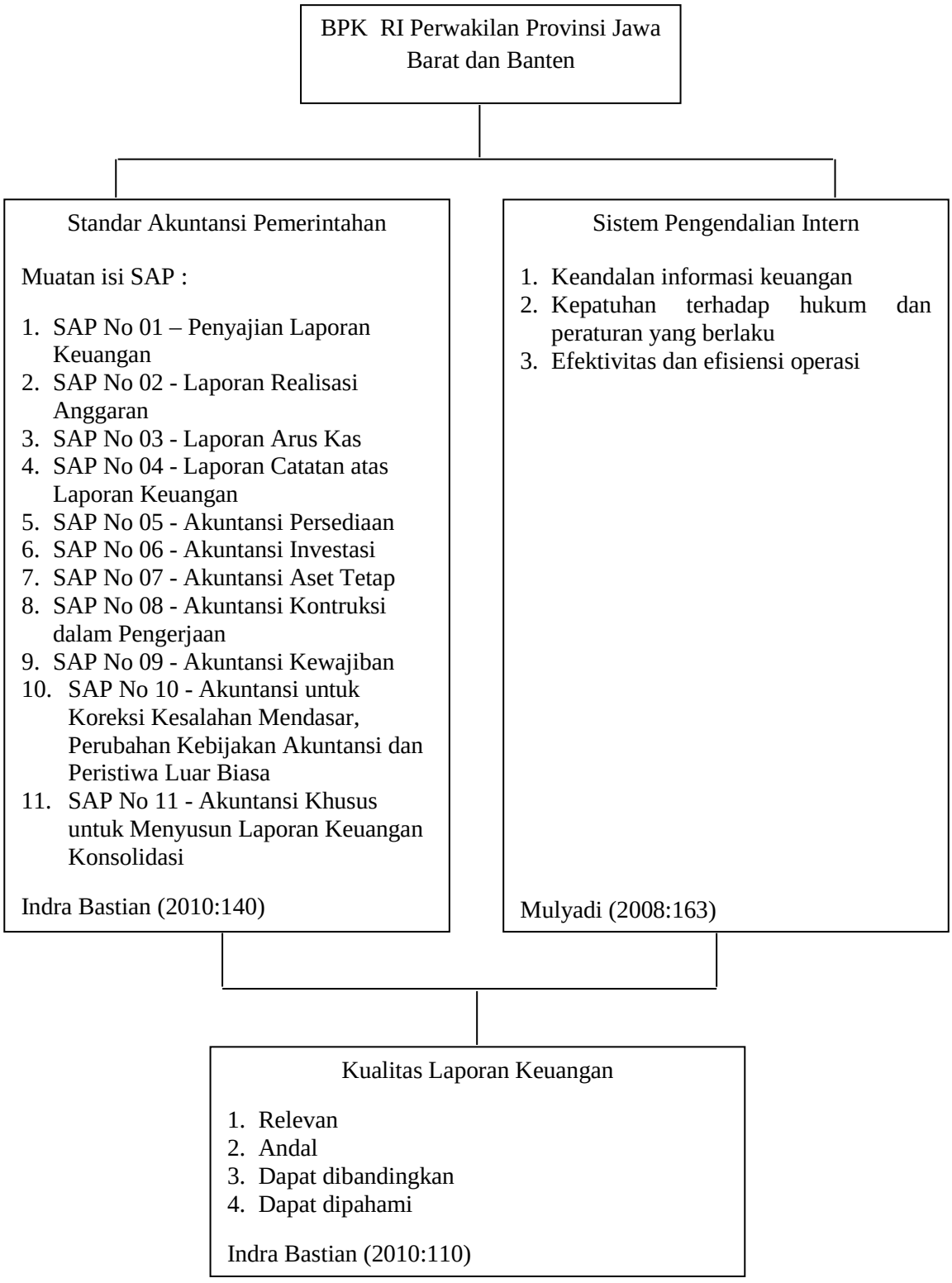
Pengendalian diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem (Arina Roshanti, Edy Sujana, Kadek Sinarwati, 2014). Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Arina Roshanti, Edy Sujana, Kadek Sinarwati, 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan kementrian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Indra Bastian, 2010:352). Penyusunan laporan keuangan baik pemda maupun pusat yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitasnya serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, dkk. 2010:93).

Dari penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Adapun pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Indra Bastian (2010:138) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah".

Menurut Abdul Halim (2010:92) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan".

Sementara menurut Rukmi Juwita (2013) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Setelah melakukan pengujian maka diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan".

Menurut Azlim, Darwanis dan Umar Abu Bakar (2012) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Penerapan SAP yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu kualitas laporan keuangan yang dihasilkan".

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Adapun pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Mahmudi (2010:29) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengndalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Menurut As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> “Semakin tinggi sistem pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi.”

Sementara menurut Tuti Herawati (2014) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> “Penelitian mengenai pengaruh Sisten Pengendalian Intern yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi”.

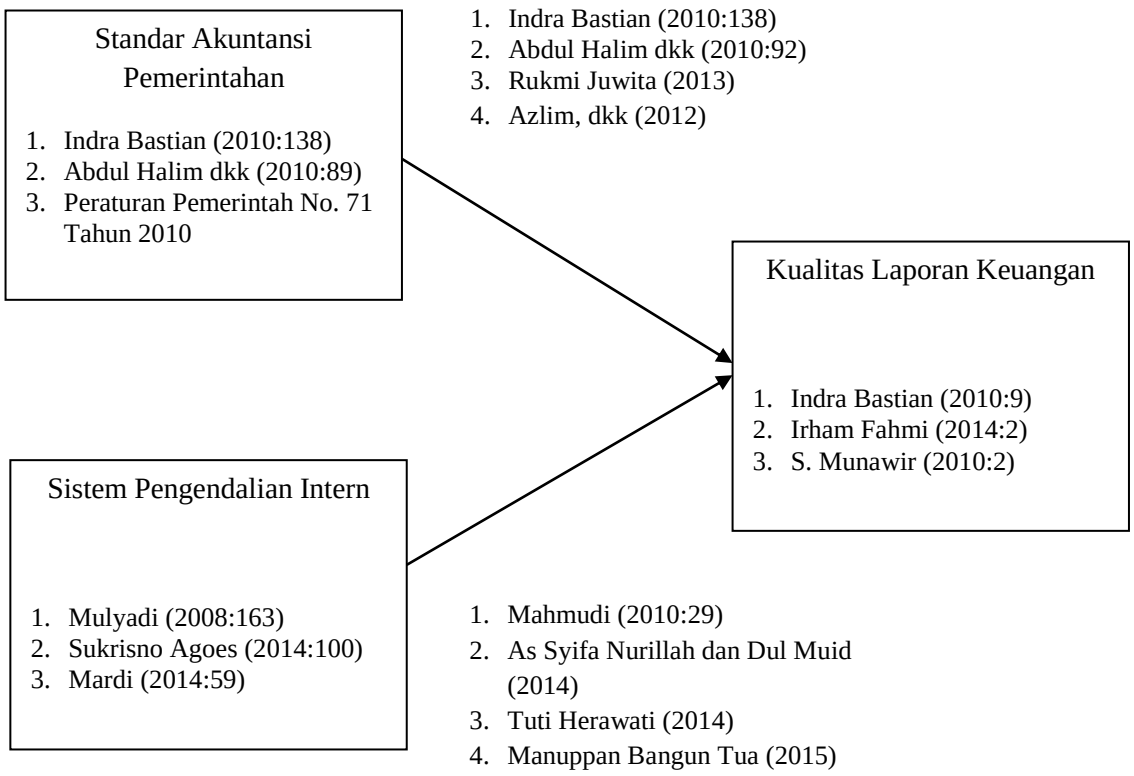
Sedangkan menurut Manuppan Bangun Tua (2015) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> “Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin buruk”.

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Pengendalian Intern yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:

Paradigma Penelitian



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan proses kesinambungan dan penelitian sebelumnya untuk mendapat informasi yang valid mengenai permasalahan peneliti, yaitu mengenai pengaruh pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporn keuangan. Berikut beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian / Sumber	Judul	Hasil
1.	Rukmi Juwita Trikonomika Volume 12, No. 2, Desember 2013, Hal. 201-214 ISSN 1411-514X	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian inimemberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkankualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota.
2.	Azlim, Darwanis, dan Abu Bakar. Jurnal Akuntansi Pasca sarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164	Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh.	Berdasarkan rumusan hipotesis ditentukan jika $\beta_2 \neq 0$ = H0 ditolak dan menerima H_a artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Koata Banda Aceh.
3.	Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo Jurnal STIE Semarang, Vol 5, No 3, Edisi Oktober 2013 ISSN : 2252-7826	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4.	Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 12, April 2008	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
5.	Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 2, No. 1.	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas - Dinas di Pemerintahan Kabupaten Jembrana)	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diketahui bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan dan postif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

6.	As Syifa Nurillah dan Dul Muid DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014, ISSN (Online): 2337-3806	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	Pernyataan hipotesis keempat (H4) dapat diterima, maka variable system pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variable SPI yang bernilai 0,289 dengan tingkat signifikan 0,030. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan SPI, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan
7.	Tuti Herawati STAR – Study & Accounting Reserch. Vol XI, No. 1 – 2014 ISSN : 1693-4482	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)	Penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikai, Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat ditarik kesimpulan : secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
8.	Manuppan Bangun Tua Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015 ISSN : 2355 – 6854	Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai)	Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin buruk.
9.	Akhmad Syarifudin Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, bulan Desember 2014	Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Interventing Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, artinya semakin efektif Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka semakin baik kualitas LKPD.
10.	Komang Sartika Dewi, Wayan Cipta, dan I Wayan Bagia.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan	Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di

	e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Manajemen, Volume 2, Tahun 2014	Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada SKPD.	Kabupaten Buleleng.

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiyono (2015:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesisjuga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H_a: Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

H_o: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.